

BAB V

KESIMPULAN

Birokrasi Pemerintahan tak terlepas dari sistem politik yang berlangsung. Muara Bungo merupakan Kabupaten yang terletak dibagian Barat Provinsi Jambi, Pada masa Republik Indonesia Muara Bungo menjadi daerah Kewedanaan Muara Bungo di bawah Kabupaten Merangin.

Kewedanaan Muara Bungo jauh sebelum Indonesia merdeka, penduduknya telah lama mengikat dengan adat istiadat yang dimana agama Islam memiliki peranan penting di dalamnya. Bahkan setelah terjadinya perioderisasi di Indonesia sistem pemerintahannya masih menerapkan sistem adat, seperti masih digunakannya sampai saat ini istilah *Dusun* dan *Rio*.

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, kewedanaan Muara Bungo mengalami banyak perkembangan terutama dalam segi sosial politik. Ada beberapa organisasi yang terbentuk di Muara Bungo, kemudian pada masa Agresi Militer Belanda dua, Muara Bungo melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan kota Muara Bungo agar tidak jatuh ke tangan Belanda, selain itu birokrat pemerintahan pada masa itu memiliki peranan penting dalam upaya penstabilan keadaan.

Demi terwujudnya kesejahteraan bagi rakyat pemerintah setempat yang bersangkutan melakukan pengajuan pemekaran daerah hal itu tak terlepas dari keinginan masyarakat itu sendiri. Terbentuknya kabupaten Bungo Tebo merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Merangin, yang dilatar belakangi oleh berdirinya Provinsi Tingkat I Jambi yang memekar Kabupaten Jambi yang mulanya terdiri atas dua Kabupaten menjadi lima Kabupaten, selain itu DPRD Peralihan dan DPR-GR Kabupaten Merangin juga mendesak Pemerintah pusat untuk memekarkan Kabupaten Merangin menjadi 2 Kabupaten yang pertama Kabupaten Kabupaten

Bangko (Kewedanaan Sarolangun dan Bangko) kedua Kabupaten Bungo Tebo (Kewedanaan Muara Bungo dan Muara Tebo). Dengan adanya tuntutan tersebut maka dilantiklah M.Saidi sebagai Bupati Bungo Tebo periode 1965-1968.